



Penerapan Prinsip *Good governance* dalam Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Uchi Lilla Qadri^{1*}, Samuel Martono², Marintan Lasrida Sitorus³, Astuti⁴

^{1,4}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

²Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

³Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: uchililla@usu.ac.id¹

Abstract. *This study aims to analyze the effect of implementing good governance principles, measured through three main dimensions namely transparency, internal accountability, and public participation, on regional financial management accountability in Regional Government Organizations (OPD) in North Sumatra Province. This research employs a quantitative approach with a causal explanatory design. Primary data were collected through structured questionnaires from 120 civil servants working in the financial sector of OPDs using purposive sampling. Data analysis was conducted using classical assumption tests and multiple linear regression. The results indicate that transparency ($\beta_1 = 0.312$; $p < 0.05$), internal accountability ($\beta_2 = 0.427$; $p < 0.05$), and public participation ($\beta_3 = 0.198$; $p < 0.05$) have a positive and significant effect on regional financial management accountability. Simultaneously, these variables explain 64.7% of the variance in accountability ($R^2 = 0.647$). The findings confirm that the holistic implementation of good governance principles is essential to enhance the quality of local government financial accountability.*

Keywords: *Good governance; Internal Accountability; Public Participation; Regional Financial Management; Transparency.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip *good governance* yang diukur melalui tiga dimensi utama yaitu transparansi, akuntabilitas internal, dan partisipasi publik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal eksplanatori. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur kepada 120 aparatur sipil negara yang bertugas di bidang keuangan OPD dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi ($\beta_1 = 0,312$; $p < 0,05$), akuntabilitas internal ($\beta_2 = 0,427$; $p < 0,05$), dan partisipasi publik ($\beta_3 = 0,198$; $p < 0,05$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Secara simultan, ketiga variabel menjelaskan sebesar 64,7% variasi akuntabilitas ($R^2 = 0,647$). Temuan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip *good governance* secara holistik penting untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Akuntabilitas Internal; Partisipasi Publik; Pengelolaan Keuangan Daerah; Tata Kelola yang Baik; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Tuntutan reformasi birokrasi dan modernisasi tata kelola pemerintahan di Indonesia menempatkan implementasi prinsip *good governance* sebagai isu kunci dalam pengelolaan sektor publik (Jejen et al., 2023). Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah tidak hanya dituntut mengelola dana transfer secara efisien, tetapi juga memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran kepada seluruh pemangku kepentingan (Dian et al., 2024). Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu daerah dengan kapasitas fiskal besar menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara konsisten.

Secara empiris, peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas yang substantif. Masih terdapat kesenjangan antara

formalitas pelaporan dengan persepsi publik terhadap transparansi dan pertanggungjawaban keuangan (Badewin et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* belum berjalan optimal, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas internal, dan partisipasi publik dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Panggeso et al., 2024). Penerapan prinsip *good governance* berperan dalam mengurangi asimetri informasi serta meningkatkan kualitas pelaporan dan pengawasan keuangan publik. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa transparansi, mekanisme pengendalian internal, dan keterlibatan publik memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah (Gabiella et al., 2026; Husnan et al., 2023).

Namun demikian, penelitian yang menguji ketiga dimensi tersebut secara simultan dalam konteks pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Utara, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas internal, dan partisipasi publik sebagai representasi prinsip *good governance* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan akuntansi sektor publik serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntansi sektor publik dan tata kelola pemerintahan

Akuntansi sektor publik merupakan instrumen utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah (Bashiruddin et al., 2024). Sistem akuntansi yang andal menyediakan informasi keuangan yang relevan, tepat waktu, dan dapat diverifikasi, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara (Cuadrado-Ballesteros et al., 2021). Dalam konteks tata kelola pemerintahan, akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian untuk meminimalkan praktik penyimpangan dan meningkatkan kualitas *governance* (Masnia et al., 2024; Setyawan, 2025).

Perkembangan akuntansi sektor publik sejalan dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas dari pemangku kepentingan. Sistem pelaporan berbasis akrual dan penguatan pengendalian internal menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam konteks reformasi birokrasi di Indonesia (Vollmer et al., 2024).

Good governance dalam akuntansi sektor publik

Good governance dalam sektor publik mencerminkan pengelolaan organisasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan kepada publik, sehingga memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Akuntabilitas internal berkaitan dengan sistem pengendalian, pelaporan, dan audit yang menjamin keandalan informasi keuangan. Sementara itu, partisipasi publik mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran, yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal (Fauziah & Febrianti, 2025; Mursalin & Khaeriyah, 2025).

Ketiga dimensi tersebut saling melengkapi dalam membentuk tata kelola keuangan yang efektif. Transparansi mengurangi asimetri informasi, akuntabilitas internal memperkuat kontrol organisasi, dan partisipasi publik menciptakan tekanan eksternal agar pemerintah bertindak lebih bertanggung jawab (Esam & Noora, 2026; Yesbarianus Parindingan et al., 2024).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara transparan dan dapat dipercaya. Akuntabilitas ini mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan (Alim & Djasuli, 2024).

Kualitas akuntabilitas dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, keandalan informasi keuangan, efisiensi penggunaan anggaran, serta respons terhadap hasil audit. Pemerintah daerah dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan, andal, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Hendaris et al., 2025).

Pengembangan hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis, transparansi, akuntabilitas internal, dan partisipasi publik merupakan dimensi utama dalam prinsip *good governance* yang berpotensi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi memungkinkan akses informasi yang lebih luas bagi publik, sehingga mendorong peningkatan pengawasan dan kualitas pertanggungjawaban keuangan. Akuntabilitas internal melalui sistem pengendalian dan pelaporan yang baik dapat meminimalkan risiko penyimpangan dan meningkatkan keandalan informasi keuangan. Partisipasi publik berperan dalam memperkuat pengawasan eksternal serta memastikan bahwa

pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H2: Akuntabilitas internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H3: Partisipasi publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H4: Transparansi, akuntabilitas internal, dan partisipasi publik secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal eksplanatori untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas internal, dan partisipasi publik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Lokus penelitian adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Populasi penelitian mencakup aparatur sipil negara yang bertugas pada bidang keuangan, perencanaan, dan penganggaran di OPD. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu, yaitu memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun dan terlibat dalam penyusunan laporan keuangan atau dokumen anggaran. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 120 responden yang dinilai representatif untuk analisis penelitian.

Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner terstruktur. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel penelitian. Variabel independen terdiri dari transparansi, akuntabilitas internal, dan partisipasi publik, sedangkan variabel dependen adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Masing-masing variabel diukur menggunakan beberapa indikator yang merepresentasikan konsep teoritis yang digunakan dalam penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Model penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana Y merupakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, X_1 adalah transparansi, X_2 adalah akuntabilitas internal, X_3 adalah partisipasi publik, α merupakan konstanta, β adalah koefisien regresi, dan ε adalah error term. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial dan simultan dengan tingkat signifikansi 5 persen. Nilai koefisien

determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan periode pengumpulan data selama tiga bulan. Dari 130 kuesioner yang disebarkan, sebanyak 120 kuesioner dinyatakan layak diolah dengan tingkat respons sebesar 92,3%.

Karakteristik responden

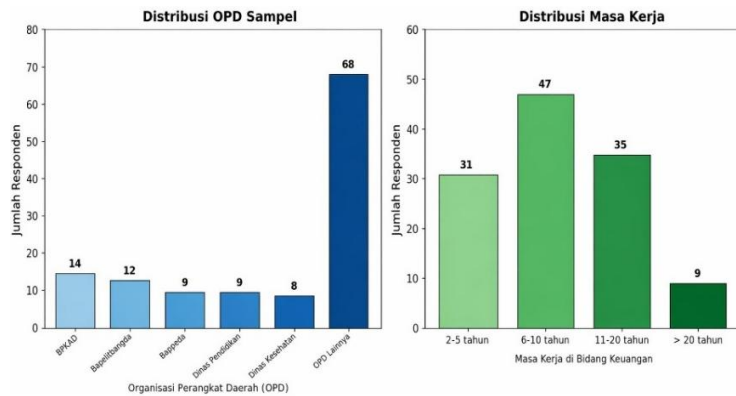
Karakteristik responden disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai profil aparatur sipil negara yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 1. Profil Demografis Responden (n = 120).

Karakteristik	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	68	56,7
	Perempuan	52	43,3
Usia	25–30 tahun	22	18,3
	31–40 tahun	55	45,8
	41–50 tahun	33	27,5
	> 50 tahun	10	8,3
	D3/D4	8	6,7
Pendidikan	S1	81	67,5
	S2	28	23,3
	S3	3	2,5
Masa Kerja	2–5 tahun	31	25,8
	6–10 tahun	47	39,2
	11–20 tahun	33	27,5
	> 20 tahun	9	7,5
OPD Sampel	BPKAD	14	11,7
	Inspektorat	12	10,0
	Bappeda	9	7,5
	Dinas Pendidikan	9	7,5
	Dinas Kesehatan	8	6,7
	OPD Lainnya	68	56,7

Sumber: Data primer yang diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas responden adalah laki-laki (56,7%) dengan dominasi usia 31–40 tahun sebesar 45,8%. Tingkat pendidikan didominasi oleh S1 (67,5%) dan S2 (23,3%), yang menunjukkan kapasitas responden yang memadai dalam memahami pengelolaan keuangan daerah. Masa kerja responden mayoritas berada pada rentang 6–10 tahun, sehingga dapat mencerminkan pengalaman yang relevan.



Gambar 1. Distribusi Responden Berdasarkan OPD dan Masa Kerja.

Distribusi responden menunjukkan keterwakilan berbagai OPD, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah secara relatif komprehensif.

Uji instrumen dan statistik deskriptif

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item instrumen dinyatakan valid dan reliabel dengan nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,70, sehingga layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel.

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's α	Keterangan
Transparansi (X_1)	8	0,857	Reliabel
Akuntabilitas Internal (X_2)	9	0,882	Reliabel
Partisipasi Publik (X_3)	7	0,831	Reliabel
Akuntabilitas Keu. Daerah (Y)	10	0,891	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah (2026).

Selanjutnya, statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel berada pada kategori tinggi, kecuali partisipasi publik yang berada pada kategori sedang hingga tinggi.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev	Kategori
Transparansi (X ₁)	120	2,75	5,00	3,91	0,543	Tinggi
Akuntabilitas Internal (X ₂)	120	2,89	5,00	4,02	0,481	Tinggi
Partisipasi Publik (X ₃)	120	2,57	4,95	3,67	0,612	Sedang-Tinggi
Akuntabilitas Keu. Daerah (Y)	120	2,80	5,00	3,84	0,558	Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah (2026).

Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada variabel akuntabilitas internal, sedangkan partisipasi publik memiliki nilai terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem internal pemerintah relatif kuat, namun keterlibatan publik masih perlu ditingkatkan.

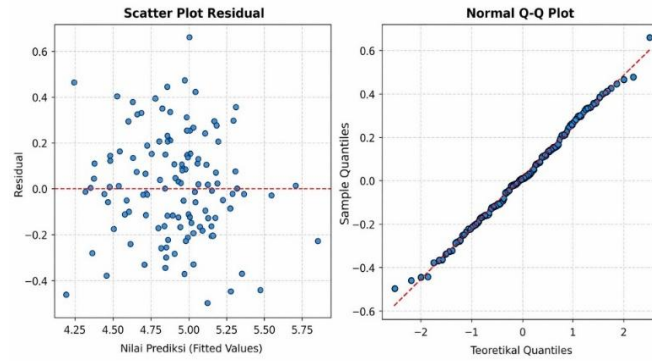
Uji asumsi klasik

Pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi kriteria normalitas, tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak terdapat heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik.

Uji Asumsi	Metode / Statistik	Nilai	Kriteria	Keterangan
Normalitas	K-S Asymp. Sig.	0,124	> 0,05	Terpenuhi
Multikolinearitas	VIF (X ₁)	1,423	< 10	Terpenuhi
	VIF (X ₂)	1,519	< 10	Terpenuhi
	VIF (X ₃)	1,381	< 10	Terpenuhi
Heteroskedastisitas	Glejser Sig. (X ₁)	0,312	> 0,05	Terpenuhi
	Glejser Sig. (X ₂)	0,287	> 0,05	Terpenuhi
	Glejser Sig. (X ₃)	0,358	> 0,05	Terpenuhi

Sumber: Data primer yang diolah (2026).



Gambar 2. Scatter Plot dan Normal Q-Q Plot.

Dengan terpenuhinya asumsi tersebut, model regresi dinyatakan layak untuk pengujian hipotesis.

Analisis regresi dan pengujian hipotesis

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.

Model	Koefisien (B)	β (Std.)	t-hitung	Sig.	Keterangan
(Constant)	1,243	–	5,812	0,000	–
Transparansi (X ₁)	0,312	0,298	5,147	0,000	H1 Diterima
Akuntabilitas Internal (X ₂)	0,427	0,368	6,924	0,000	H2 Diterima
Partisipasi Publik (X ₃)	0,198	0,218	3,421	0,001	H3 Diterima
R-Square (R ²)	0,647	–	–	–	–
Adjusted R ²	0,638	–	–	–	–
F-hitung	71,842	–	–	0,000	H4 Diterima

Sumber: Data primer yang diolah (2026).

Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 1,243 + 0,312X_1 + 0,427X_2 + 0,198X_3 + \varepsilon$$

Secara parsial, transparansi, akuntabilitas internal, dan partisipasi publik terbukti berpengaruh signifikan. Akuntabilitas internal memiliki pengaruh paling dominan, yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan daerah.

Tabel 6. Koefisien Determinasi dan Uji Simultan.

Statistik	Nilai
R (Koefisien Korelasi Berganda)	0,804
<i>R-Square</i> (R^2)	0,647
<i>Adjusted R-Square</i>	0,638
<i>Std. Error of the Estimate</i>	0,336
F-hitung	71,842
df1 / df2	3 / 116
Sig. F	0,000

Sumber: Data primer yang diolah (2026).

Nilai R^2 sebesar 0,647 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 64,7% variasi akuntabilitas. Uji simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Keterbukaan informasi memungkinkan publik melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, sehingga mendorong peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa transparansi merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel (Sari & Muslim, 2025; Schnell, 2023). Akuntabilitas internal terbukti sebagai variabel yang paling dominan dalam memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap standar akuntansi, serta mekanisme audit memiliki peran strategis dalam memastikan keandalan laporan keuangan. Temuan ini konsisten dengan teori akuntansi sektor publik yang menekankan pentingnya sistem pengendalian sebagai instrumen utama dalam mencegah penyimpangan (Bediako et al., 2025).

Partisipasi publik juga berpengaruh positif, meskipun dengan tingkat pengaruh yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran masih belum optimal. Penguatan mekanisme partisipasi, seperti forum musyawarah perencanaan pembangunan, perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas secara lebih inklusif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas internal, dan partisipasi publik berperan

penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya pemerintah daerah memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas internal, dan partisipasi publik sebagai dimensi utama prinsip *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Secara parsial, akuntabilitas internal merupakan faktor yang paling dominan, diikuti oleh transparansi dan partisipasi publik. Secara simultan, ketiga variabel mampu menjelaskan sebagian besar variasi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang menunjukkan bahwa penerapan *good governance* secara terpadu menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengendalian internal secara berkelanjutan, meningkatkan keterbukaan dan aksesibilitas informasi keuangan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih substantif dalam proses penganggaran. Upaya tersebut penting untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan sampel yang hanya berfokus pada OPD di tingkat provinsi, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas ke seluruh pemerintah daerah. Selain itu, variabel yang digunakan masih terbatas pada tiga dimensi *good governance*, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas faktor yang memengaruhi akuntabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian serta menambahkan variabel lain seperti kapasitas sumber daya manusia, dukungan teknologi informasi, dan komitmen organisasi guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Alim, R. Z., & Djasuli, M. (2024). Optimization Of Regional Financial Management For Sustainable Development. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(2), 789-793. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i2.2699>
- Badewin, Elizabeth, R., Rusmardiana, A., Rely, G., & Judijanto, L. (2025). Accountability and Transparency in Local Government Financial Reporting: An Empirical Study in

- Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(4), 831-842. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i4.3642>
- Bashiruddin, A., Haliah, H., & Andi, K. (2024). The Transformation of Public Sector Accounting in Encouraging Improvement of Public Service Quality. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 1(4), 214-227. <https://doi.org/10.61132/ijems.v1i4.255>
- Bediako, R., Ocansey, E. O. N. D., & Oppong, D. (2025). Accounting Controls, Governance, and Anti-Corruption in Ghana's Public Sector. *African Journal of Accounting and Financial Research*, 8(4), 59-76. <https://doi.org/10.52589/ajaf-rp8qzkc>
- Cuadrado-Ballesteros, B., Santis, S., & Bisogno, M. (2021). Public-sector Financial Management and E-government: The Role Played by Accounting Systems. *International Journal of Public Administration*, 45(8), 605-619. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1868506>
- Dian, F., Nirwana, N., & Haliah, H. (2024). Budget Transparency and Accountability in Local Government. *Asian Journal of Management Analytics*, 3(4), 1171-1184. <https://doi.org/10.55927/ajma.v3i4.11878>
- Esam, O. E., & Noora, A. H. (2026). The Role of Accounting in Enhancing Transparency and Accountability in the Public Sector . *International Journal of Accounting and Management Sciences*, 4(3). <https://doi.org/10.56830/ijams07202505>
- Fauziyah, N., & Febrianti, A. A. (2025). Realizing *Good governance* in Improving the Quality of Public Services. *Irpia : Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 10(3), 8-12. <https://doi.org/10.71040/irpia.v10i3.296>
- Gabriella, S., Muharrammairi, U., Aprilliani, L., Rizqi, R., & Nst, D. A. D. (2026). The Role Of Public Sector Audit In Improving Accountability And Transparency In Local Government Financial Management. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital*, 5(1), 309-312. <https://doi.org/10.37676/jambd.v5i1.10297>
- Hendaris, R. B., Zulfikar, R., Muchlis, M., & Ibrani, E. Y. (2025). The Impact of Financial Report Quality on Local Government Performance the Mediating Role of Accountability and The Effect of local government characteristics. *International Journal of Environmental Sciences*, 2915-2928. <https://doi.org/10.64252/axcvc190>
- Husnan, L. H., Manan, A., Jufri, A., & Muhdin. (2023). Effects of Government Internal Control System, Accessibility Financial Report, Local Financial Management Transparency, Local Financial Management Accountability Toward Local Government Performance. *European Journal of Theoretical and Applied Sciences*, 1(6), 629-640. [https://doi.org/10.59324/ejtas.2023.1\(6\).63](https://doi.org/10.59324/ejtas.2023.1(6).63)
- Jen, H., Efik, Y., Neni, R., & Rusli, K. I. (2023). The Urgency of State Administration Attitude for *Good governance*. *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 239-249. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v39i2.2963>
- Masnia, M., Haliah, & Nirwana. (2024). Implementation of Public Sector Accounting in a Government Agency. *Journal of Advances in Accounting, Economics, and Management*, 2(2). <https://doi.org/10.47134/aaem.v2i2.472>
- Mursalin, M., & Khaeriyah, K. (2025). Accountability and Transparency in Regional Budget Management for *Good governance*. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, 2(4), 140-148. <https://doi.org/10.62951/ijecm.v2i4.991>

- Panggeso, A. G., Nirwana, & Haliah. (2024). Transparency and Accountability in Public Financial Reporting: Implementation and Challenges in the Digital Era: A Systematic Literature Review. *International Journal of Business and Applied Economics*, 3(6), 979-990. <https://doi.org/10.55927/ijbae.v3i6.11875>
- Sari, R., & Muslim, M. (2025). Public Budget Transparency and Accountability in Preventing Corruption and Inefficiency. *Advances in Management & Financial Reporting*, 4(1), 1-17. <https://doi.org/10.60079/amfr.v4i1.467>
- Schnell, S. (2023). To know is to act? Revisiting the impact of government transparency on corruption. *Public Administration and Development*, 43(5), 355-367. <https://doi.org/10.1002/pad.2029>
- Setyawan, W. (2025). Bridging Between Financial Performance and Government Performance: The Role of Public Sector Accounting in Realizing *Good governance*. *Oikonomia : Journal of Management Economics and Accounting*, 2(2), 1-15. <https://doi.org/10.61942/oikonomia.v2i2.291>
- Vollmer, H., van Helden, J., & Steccolini, I. (2024). New development: Keeping up with accounting in society—public sector challenges. *Public Money & Management*, 44(8), 733-736. <https://doi.org/10.1080/09540962.2024.2364451>
- Yesbarianus Parindingan, F., Haliah, H., & Nirwana, N. (2024). Evaluation of Transparency and Accountability of Regional Government Financial Reports in the Digitalization Era. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(5), 1051-1058. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i5.1066>